

INTISARI

Visualisasi Indeks Desa Membangun (IDM) memiliki potensi sebagai basis pengambilan kebijakan, termasuk dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi visualisasi Indeks Desa Membangun (IDM) dalam pengalokasian Dana Desa serta mengkaji prediksi ketahanan politik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 1) wawancara, 2) survei, 3) dokumentasi, 4) studi pustaka, dan 5) internet. Teknik analisis data dilakukan dengan cara 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) model data, dan 4) penarikan/verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa visualisasi IDM yang dilakukan oleh Kemendesa dan *Startup Kedata* berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) berpotensi untuk meningkatkan pemerintahan yang akuntabel dan efektivitas kebijakan afirmatif. Aspek pemerintahan yang memiliki akuntabilitas tercermin dari potensi BDA yang dapat 1) memberikan keterbukaan atau transparansi, 2) memberikan pelayanan yang responsif, 3) membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, dan 4) memberikan sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Sementara itu potensi efektivitas kebijakan afirmatif tergambar dalam kemampuan BDA untuk menciptakan 1) kejelasan tujuan, 2) kejelasan strategi mencapai tujuan, dan 3) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Namun demikian, untuk menggali potensi tersebut diperlukan penyelesaian terhadap persoalan politisasi IDM, ego sektoral atau masalah hubungan antarlembaga, cara pandang negara terhadap desa, dan sumber daya manusia. Di samping itu terdapat permasalahan teknis lain seperti standarisasi data, interoperabilitas data, dan infrastruktur yang belum memadai. Selanjutnya peringkat ketahanan di Kemendesa terkait dengan potensi visualisasi IDM sebagai basis pengalokasian Dana Desa adalah Tangguh. Peringkat Tangguh didapatkan dalam semua kelompok responden. Namun demikian dari empat aspek yang diukur ketahanan politiknya yakni posisi isu/dukungan, potensi visualisasi IDM, kesiapan sumber daya, dan ranking optimisme aspek kesiapan sumber daya merupakan aspek yang mendapatkan nilai yang paling rendah dibanding semua aspek dalam kelompok responden manapun.

Kata Kunci : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Big Data Analytics*, Dana Desa, Ketahanan Politik, *Startup Kedata*

ABSTRACT

Visualization of Indeks Desa Membangun (IDM) has potential in the policymaking process, including in the allocation of Village Funds as mandated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study aims to determine the potential for visualization of Indeks Desa Membangun (IDM) as part of BDA in the allocation of Village Funds and to examine predictions of political resilience in the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Kemendesa).

This research is field research and is descriptive research. The approach used in this research is a mixed-method, namely qualitative and quantitative research. Data collection techniques were carried out using the following methods of 1) interviews, 2) surveys, 3) documentation, 4) literature study, and 5) internet. The data analysis technique was carried out by 1) data collection, 2) data reduction, 3) data modeling, and 4) conclusion drawing/verification.

The results show that the visualization of IDM conducted by the Ministry of Villages and Startup Kedata based on Geographic Information Systems (GIS) has the potential to improve accountability of the governance and the effectiveness of affirmative policies. Aspects of accountable governance are reflected in the potentials of visualization of IDM to 1) provide openness or transparency, 2) provide responsive services, 3) create space for public participation, and 4) provide a means for the public to assess government performance. Meanwhile, the potentials of the effectiveness of affirmative policies are reflected in visualization's ability to create 1) clarity of objectives, 2) clarity of strategies to achieve goals, and 3) an educational system of supervision and control. However, to create these potentials, it is necessary to solve the problems of the politicization of IDM, inter-institutional relations problems, the state's perspective on villages, and human resources in addition to other technical problems such as data standardization, data interoperability, and infrastructure that has not been developed yet. adequate. On second research question, the result of the study showed that the resiliency of Kemendesa is "Tangguh" in terms of the use of IDM visualization as basis of allocating village funds. Tangguh ratings are found in all groups of respondents. However, of the four aspects measured for political resilience, namely the issue/support position, potential of IDM visualization, resource readiness, and optimism ranking, the resource readiness aspect is the aspect that gets the lowest score compared to all aspects in any respondent group.

Keywords : *Ministry of Village Development of Disadvantaged Areas and Transmigration, Big Data Analytics, Village Funds, Political Resilience, Startup Kedata*